

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/tanggal : Kamis, 17 September 2015
Waktu : Pukul 13.30 s.d 14.50 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara : Pembahasan RKA KL Tahun 2016 dan pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria dari Komisi.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 13.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pembahasan RKA KL Tahun 2016 dan pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria dari Komisi, Jaksa Agung RI menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Sesuai surat Menteri Keuangan No.: S-564/MK.02/2015 tgl. 27 Juli 2015 perihal pemuktahiran pagu anggaran K/L TA 2016 Kejaksaan Agung memperoleh anggaran sebesar Rp. 4.706.013.339.000,- untuk melaksanakan 8 program kegiatan, sebagai berikut :
 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI sebesar Rp.3.677.121.006.000
 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI sebesar Rp.62.025.077.000
 3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI sebesar Rp.19.675.243.000
 4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan sebesar Rp.110.644.053.000

5. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam sebesar Rp.248.190.071.000
 6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum sebesar Rp.307.655.120.000
 7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp.260.072.597.000
 8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebesar Rp.20.630.172.000
- 2) Pagu anggaran tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp.361.695.576.000,- bila dibandingkan dengan pagu anggaran TA 2015 yang mencapai Rp.5.067.708.915.000,-. Penurunan yang signifikan terjadi pada anggaran belanja barang non operasional yang dialokasikan untuk anggaran penanganan perkara pada Kejaksaan di seluruh Indonesia, hal ini akan berdampak pada penurunan volume penanganan perkara dan dikhawatirkan pencapaian target dalam RPJMN tidak akan tercapai.
- 3) Kejaksaan Agung mengajukan usulan tambahan anggaran TA. 2016 sebesar Rp.598.983.658.695,- sesuai Kesepakatan Forum Trilateral Meeting 2016 untuk melaksanakan program sebagai berikut :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI sebesar Rp.41.402.314.880,-
 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI sebesar Rp.87.928.080.000,-
 3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI sebesar Rp.1.768.560.000,-
 4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan sebesar Rp.32.465.310.000,-
 5. Program Penyelidikan / Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam sebesar Rp.8.912.360.000,-
 6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum sebesar Rp. Rp.185.243.400.000,
 7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp.109.126.998.815,-
 8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebesar Rp.9.834.735.000,-
 9. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepala daerah sebesar Rp.58.665.600.000,-
 10. Operasional Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) sebesar Rp.63.636.300.000,-
2. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :
- Adanya pengurangan belanja barang non operasional yang digunakan untuk penanganan perkara, hal tersebut menyebabkan permasalahan dalam penegakan hukum.

- Terkait Program penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM berat, dan Perkara Tipikor, diharapkan dengan kenaikan anggaran yang besar perkara-perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat.
 - Apa fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) khususnya terhadap berbagai macam persoalan di daerah-daerah/kabupaten/kota.
 - Masih banyak kantor Kejaksaan yang memprihatinkan kondisi bangunannya, untuk itu dibutuhkan perbaikan agar kinerja kejaksaan bisa lebih maksimal.
 - Perlu mengevaluasi sistem pelaksanaan anggaran di Kejaksaan Agung, karena secara kuantitas sudah mencukupi tapi secara kualitas masih belum memadai. Perlu merinci kembali anggaran agar alokasi anggarannya tepat.
 - Peningkatan SDM di Kejaksaan Agung dengan cara melanjutkan pendidikan pasca sarjana diharapkan dapat terealisasi.
 - Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di dalam masyarakat masih belum bisa terealisasi.
 - Meminta Jaksa Agung dapat melakukan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas di lingkungan Kejaksaan.
 - Terkait dengan usulan penambahan anggaran melalui pertemuan trilateral, apakah sudah disetujui. Program manakah yang lebih diutamakan oleh Kejaksaan Agung.
 - Meminta Jaksa Agung agar dikaji ulang terkait Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), Kejaksaan Tinggi, maupun di Kejaksaan Negeri dengan membuat skala prioritas agar tidak memberatkan beban anggaran.
 - Bahwa sepanjang penambahan anggaran dapat meningkatkan kinerja dan kualitas SDM para Jaksa, maka hal tersebut bukanlah menjadi permasalahan.
 - Meminta penjelasan Jaksa Agung terkait dengan dana penanganan perkara 15 kasus tindak pidana korupsi.
 - Tupoksi utama Kejaksaan Agung adalah penanganan penyelesaian perkara tidak pidana umum, dikaitkan dengan jumlah perkara yang ditangani. Maka dalam menyelesaikan satu perkara pidana membutuhkan biaya sebesar Rp.4,4 juta, dengan jumlah anggaran yang kecil ini, maka pemerintah harus memperhatikan dan menambah anggaran yang sangat kecil terhadap penegakkan hukum.
 - Terkait dengan eksekusi pidana mati, mengapa Kejaksaan Agung hanya mencantumkan 14 terpidana, sementara jumlah terpidana mati yang ada dalam daftar tunggu cukup banyak. Apakah hal ini berkaitan dengan jumlah anggaran yang tidak mencukupi.
3. Bahwa Jaksa Agung RI akan menjawab secara tertulis atas semua pertanyaan yang telah disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung Republik Indonesia mengambil kesimpulan / keputusan sebagai berikut :

Komisi III DPR RI akan menindaklanjuti usulan tambahan anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebesar Rp. 598.983.658.695,- berikut RKP tahun 2016 yang direncanakan, guna mendapat tanggapan dari fraksi-fraksi dalam Rapat Pleno Komisi yang selanjutnya akan diteruskan kepada Badan Anggaran DPR RI.

Rapat ditutup pukul 14.50 WIB

KOMISI III DPR RI